

SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 18 TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan bagian perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pada Dinas Daerah kabupaten/ kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 061/226 tanggal 10 Januari 2018 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun
2016 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas adalah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk UPTD nya.

5. Badan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Badan adalah pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk UPTD nya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Kepala UPTD adalah pegawai yang diangkat dan disertai tugas oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memimpin UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kelas A adalah klasifikasi UPTD untuk mawadahi beban kerja yang besar dengan ketentuan lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.
10. Kelas B adalah klasifikasi UPTD untuk mawadahi beban kerja yang kecil dengan ketentuan lingkup tugas dan fungsinya hanya 1 (satu) fungsi pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya hanya 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerja antara 5000 (lima ribu) sampai dengan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif per tahun.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah pegawai yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.
15. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal.
17. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Pendidikan adalah unit kerja non struktural yang bertugas melakukan

koordinator layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.

18. Pengawas Sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
19. Kepala UPTD Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah pegawai yang diangkat dari Jabatan Fungsional Guru dan disertai tugas oleh pejabat pembina kepegawaian untuk memimpin satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
21. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan sekolah dasar atau madrasah atau

bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah dasar atau madrasah.

23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
24. Kepala Puskesmas adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN UPTD Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 15 (lima belas) UPTD.
- (2) Selain 15 (lima belas) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibentuk:
 - a. Satuan Pendidikan
 - b. Korwil Pendidikan; dan
 - c. Puskesmas.

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 2 (dua), yaitu:
 1. UPTD Pengelolaan Perlengkapan Alat Berat; dan
 2. UPTD Laboratorium.
- b. UPTD pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 4 (empat), yaitu:
 1. UPTD Metrologi Legal;
 2. UPTD Pasar Wilayah I;
 3. UPTD Pasar Wilayah II; dan
 4. UPTD Pasar Wilayah III.
- c. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 1 (satu), yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu), yaitu UPTD Laboratorium Lingkungan.
- e. UPTD pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 3 (tiga), yaitu:
 1. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang;
 2. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Negeri Lama; dan
 3. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhan Bilik.
- f. UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sebanyak 4 (empat), yaitu:
 1. UPTD Pendapatan Wilayah I;
 2. UPTD Pendapatan Wilayah II;
 3. UPTD Pendapatan Wilayah III; dan
 4. UPTD Pendapatan Wilayah IV.

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Satuan Pendidikan TKN;
 - b. Satuan Pendidikan SDN; dan
 - c. Satuan Pendidikan SMPN.
- (2) Satuan Pendidikan TKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan Pendidikan SDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Satuan Pendidikan SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Korwil pendidikan Kecamatan Rantau Utara;
 - b. Korwil pendidikan Kecamatan Rantau Selatan;
 - c. Korwil pendidikan Kecamatan Bilah Barat;
 - d. Korwil pendidikan Kecamatan Bilah Hulu;
 - e. Korwil pendidikan Kecamatan Pangkatan;
 - f. Korwil pendidikan Kecamatan Bilah Hilir;
 - g. Korwil pendidikan Kecamatan Panai Hulu;
 - h. Korwil pendidikan Kecamatan Panai Tengah; dan
 - i. Korwil pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
- (6) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan koordinasi layanan administrasi pada tiap-tiap satuan pendidikan jenjang:

- a. TKN;
- b. SDN; dan
- c. SMPN.

- (7) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah atau dari Pegawai Negeri Sipil.
- (8) Pengawas Sekolah yang diangkat sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disamping menjalankan tugasnya sebagai koordinator juga tetap melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, korwil pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Puskesmas Suka Makmur;
 - b. Puskesmas Janji;
 - c. Puskesmas Kota Rantauprapat;
 - d. Puskesmas Perlayuan;
 - e. Puskesmas Sigambal;
 - f. Puskesmas Lingga Tiga;
 - g. Puskesmas Perbaungan;
 - h. Puskesmas Pangkatan;
 - i. Puskesmas Negeri Lama;
 - j. Puskesmas Tanjung Haloban;

- k. Puskesmas Teluk Sentosa;
 - l. Puskesmas Labuhanbilik;
 - m. Puskesmas Sei Berombang;
 - n. Puskesmas Gunung Selamat; dan
 - o. Puskesmas Penggantungan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berasal dari pejabat fungsional tenaga kesehatan.
- (3) Pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diangkat sebagai Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamping menjalankan tugasnya sebagai Kepala Puskesmas juga tetap melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Klasifikasi Kelas UPTD

Pasal 6

- (1) UPTD yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.

Pasal 7

- (1) UPTD yang dibentuk pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan UPTD Kelas A.

- (2) UPTD yang dibentuk pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan UPTD Kelas A.
- (3) UPTD yang dibentuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan UPTD Kelas B.
- (4) UPTD yang dibentuk pada Dinas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan UPTD Kelas A.
- (5) UPTD yang dibentuk pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan UPTD Kelas B.
- (6) UPTD yang dibentuk pada Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melalui sekretaris Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural.

Pasal 10

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui sekretaris Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional, akuntabel, dan sinergis.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 11

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang terdiri dari:
- a. UPTD Pengelolaan Alat Berat mempunyai tugas pengelolaan perlengkapan alat berat dan memberikan pelayanan penyewaan alat berat kepada masyarakat;
 - b. UPTD Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengkompilasian, pengujian, pemeliharaan data hasil pengujian dan membuat laporan di bidang laboratorium tanah, aspal, dan beton serta melakukan kegiatan pengadaan, inventarisasi, dan perawatan alat-alat laboratorium;
 - c. UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan metrologi legal berupa tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
 - d. UPTD Pasar Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan pekan meliputi Kecamatan Rantau Utara, Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Bilah Barat;
 - e. UPTD Pasar Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan pekan meliputi wilayah Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hilir;
 - f. UPTD Pasar Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan pemungutan retribusi pasar dan pekan

- meliputi wilayah Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hilir;
- g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan pelayanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus serta mendampingi korban untuk mendapatkan pemenuhan haknya;
 - h. UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup berupa pengujian kualitas lingkungan dan pengelolaannya;
 - i. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sei Berombang mempunyai tugas kegiatan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan Panai Hilir;
 - j. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Negeri Lama mempunyai tugas kegiatan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan Bilah Hilir;
 - k. UPTD Penanggulangan Bahaya Kebakaran Labuhan Bilik mempunyai tugas kegiatan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kecamatan Panai Tengah;
 - l. UPTD Pendapatan Wilayah I melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Rantau Utara,
 - m. UPTD Pendapatan Wilayah II melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Rantau Selatan dan Kecamatan Bilah Hulu ;
 - n. UPTD Pendapatan Wilayah III melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan

- retribusi daerah di wilayah Kecamatan Pangkatan dan Kecamatan Bilah Hilir ; dan
- o. UPTD Pendapatan Wilayah IV melaksanakan kegiatan teknis berupa penyelenggaraan pelayanan pajak dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Tengah dan Kecamatan Panai Hilir.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 12

Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kepada masyarakat pada Dinas Pendidikan.

Pasal 13

Korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada tiap-tiap satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 15

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Korwil pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi melaksanakan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat Kewenangan

Pasal 19

Kewenangan yang dimiliki UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kewenangan sebahagian urusan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang membawahi UPTD.

Pasal 20

Kewenangan yang dimiliki satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kewenangan penyelenggaran pengelolaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kewenangan yang dimiliki korwil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan kewenangan urusan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Kewenangan yang dimiliki puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kewenangan urusan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas A terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi UPTD Kelas B, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Kelas B sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi satuan pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi korwil pendidikan terdiri atas:
 - a. Koordinator;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi korwil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

- (3) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 28

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi:

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
- b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD;
- c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas/Kepala Badan yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan urusan administrasi, persuratan, kearsipan dan rumah tangga UPTD;
- b. melakukan tata usaha dan kelengkapan administrasi kepegawaian pada UPTD untuk proses lebih lanjut;
- c. menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya secara berkala; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan atau Kepala UPTD.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 24 ayat (1) huruf b sesuai dengan bidang keahliannya terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (2) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (1) huruf memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Jumlah kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 32

- (1) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan

fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir tugas dan fungsi korwil pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (7) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.
- (10) Jumlah kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 33

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir tugas dan fungsi Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b sesuai dengan bidang keahliannya terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional keterampilan.
- (3) Kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

memiliki jenis dan jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Setiap jabatan fungsional pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap jabatan pelaksana pada kelompok jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan dan beban kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Kepala Puskesmas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 35

- (1) Kepala UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala UPTD yang merupakan pejabat struktural Eselon IV/a yang setara dengan pejabat pengawas.
- (2) Kepala UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala UPTD yang merupakan pejabat struktural Eselon IV/b setara dengan pejabat pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala subbagian yang merupakan pejabat struktural Eselon IV/b yang setara dengan pejabat

pengawas.

- (4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah.
- (5) Kepala puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala puskesmas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD, Kepala Puskesmas dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

- (5) Koordinator Korwil Pendidikan dalam melaksanakan tugas melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap satuan pendidikan di wilayahnya.

Pasal 37

Hubungan kerja antara kelompok jabatan fungsional dengan Kepala Subbagian Tata Usaha dan/atau jabatan pelaksana merupakan hubungan bersifat koordinasi kemitraan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat baru

- berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. Puskesmas yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - c. Pegawai UPTD yang dibubarkan berdasarkan Peraturan Bupati ini dialih tugaskan ke masing-masing Dinas atau Badan yang membawahnya atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Pelantikan pejabat baru dan pengalih tugas pegawai pada UPTD yang dibubarkan dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2009 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 29 Oktober 2018

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

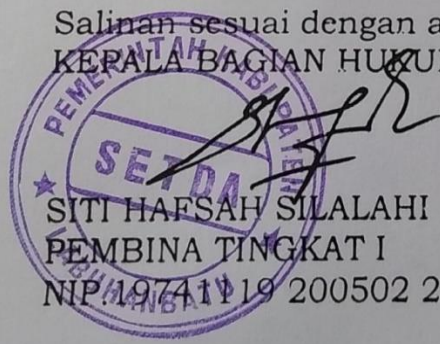
Nomor 18 Tahun 2018
Tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



SITI HAFSAH SILALAH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19741119 200502 2 001

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 29 Oktober 2018

SATUAN PENDIDIKAN TKN

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU |
| 1 | 69752174 | TKN SATAP SDN 112144 SIRINGO-RINGO | TKN SATAP SDN 11 RANTAU UTARA |
| 2 | 10262160 | TKN PEMBINA | TKN PEMBINA RANTAUPRAPAT |
| 3 | 69752181 | TKN SATAP SDN 115523 KP. MENANTI | TKN SATAP SDN 27 BILAH HULU |
| 4 | 69752183 | TKN PEMBINA PANGKATAN | TKN PEMBINA PANGKATAN |
| 5 | 69752184 | TKN SATAP SDN 112194 PANGKATAN | TKN SATAP SDN 01 PANGKATAN |
| 6 | 69752173 | TKN SATAP SDN 117471 SIBARGOT | TKN SATAP SDN 22 BILAH BARAT |
| 7 | 69752185 | TKN SATAP SDN 112203 AJAMU | TKN SATAP SDN 01 PANAI HULU |

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Lampiran II :Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 18 Tahun 2018
 Tanggal : 29 Oktober 2018

SATUAN PENDIDIKAN SDN

a. KECAMATAN RANTAU UTARA

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|----------------------------------|---------------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU |
| 1 | 10205920 | SDN 112134 RANTAUPRAPAT | SDN 01 RANTAU UTARA |
| 2 | 10205919 | SDN 112135 RANTAUPRAPAT | SDN 02 RANTAU UTARA |
| 3 | 10205918 | SDN 112136 RANTAUPRAPAT | SDN 03 RANTAU UTARA |
| 4 | 10205917 | SDN 112137 RANTAUPRAPAT | SDN 04 RANTAU UTARA |
| 5 | 10205916 | SDN 112138 RANTAUPRAPAT | SDN 05 RANTAU UTARA |
| 6 | 10205915 | SDN 112139 RANTAUPRAPAT | SDN 06 RANTAU UTARA |
| 7 | 10205914 | SDN 112140 RANTAUPRAPAT | SDN 07 RANTAU UTARA |
| 8 | 10205929 | SDN 112141 RANTAUPRAPAT | SDN 08 RANTAU UTARA |
| 9 | 10205930 | SDN 112142 RANTAUPRAPAT | SDN 09 RANTAU UTARA |
| 10 | 10205945 | SDN 112143 RANTAUPRAPAT | SDN 10 RANTAU UTARA |
| 11 | 10205944 | SDN 112144 SIRINGO-RINGO | SDN 11 RANTAU UTARA |
| 12 | 10205932 | SDN 112156 PERLAYUAN | SDN 12 RANTAU UTARA |
| 13 | 10205892 | SDN 112162 RANTAUPRAPAT | SDN 13 RANTAU UTARA |
| 14 | 10205840 | SDN 114375 RANTAUPRAPAT | SDN 14 RANTAU UTARA |
| 15 | 10205816 | SDN 114382 RANTAUPRAPAT | SDN 15 RANTAU UTARA |
| 16 | 10205011 | SDN 115521 BANDAR GULA TIMUR | SDN 16 RANTAU UTARA |
| 17 | 10205008 | SDN 115524 RANTAUPRAPAT | SDN 17 RANTAU UTARA |
| 18 | 10205037 | SDN 115530 RANTAUPRAPAT | SDN 18 RANTAU UTARA |
| 19 | 10205035 | SDN 115532 RANTAUPRAPAT | SDN 19 RANTAU UTARA |
| 20 | 10205032 | SDN 115535 SIRANDORUNG | SDN 20 RANTAU UTARA |
| 21 | 10205100 | SDN 117470 KAMPUNG SAWAH | SDN 21 RANTAU UTARA |
| 22 | 10204868 | SDN 117835 PASIR TINGGI | SDN 22 RANTAU UTARA |
| 23 | 10204990 | SDN 118154 PNK BANDAR GULA TIMUR | SDN 23 RANTAU UTARA |
| 24 | 10204989 | SDN 118155 PADANG MATINGGI | SDN 24 RANTAU UTARA |
| 25 | 10205330 | SDN 118240 SEI TAWAR | SDN 25 RANTAU UTARA |

b. KECAMATAN RANTAU SELATAN

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|--------------------------|-----------------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU |
| 1 | 10205941 | SDN 112147 BAKARAN BATU | SDN 01 RANTAU SELATAN |
| 2 | 10205940 | SDN 112148 UJUNG BANDAR | SDN 02 RANTAU SELATAN |
| 3 | 10205307 | SDN 112149 SIGAMBAL | SDN 03 RANTAU SELATAN |
| 4 | 10205938 | SDN 112150 SIGAMBAL | SDN 04 RANTAU SELATAN |
| 5 | 10205935 | SDN 112153 KAMPUNG SALAM | SDN 05 RANTAU SELATAN |
| 6 | 10205934 | SDN 112154 PURBA BANGUN | SDN 06 RANTAU SELATAN |
| 7 | 10205883 | SDN 112169 DANAU BALE-B | SDN 07 RANTAU SELATAN |
| 8 | 10205839 | SDN 114376 SIGAMBAL | SDN 08 RANTAU SELATAN |
| 9 | 10205007 | SDN 115525 SIGAMBAL | SDN 09 RANTAU SELATAN |
| 10 | 10205030 | SDN 116241 KAMPUNG BARU | SDN 10 RANTAU SELATAN |
| 11 | 10205143 | SDN 116874 BAKARAN BATU | SDN 11 RANTAU SELATAN |
| 12 | 10205142 | SDN 116875 UJUNG BANDAR | SDN 12 RANTAU SELATAN |
| 13 | 10205139 | SDN 116878 KALI BENING | SDN 13 RANTAU SELATAN |
| 14 | 10204866 | SDN 117833 DANAU BALE-C | SDN 14 RANTAU SELATAN |
| 15 | 10204879 | SDN 117837 BANDAR REJO | SDN 15 RANTAU SELATAN |
| 16 | 10204992 | SDN 117983 BAKRAN BATU | SDN 16 RANTAU SELATAN |
| 17 | 10260303 | SDN 118321 SIGAMBAL | SDN 17 RANTAU SELATAN |
| 18 | 10205310 | SDN 118373 KAMPUNG SALAM | SDN 18 RANTAU SELATAN |
| 19 | 10205361 | SDN 118378 UJUNG BANDAR | SDN 19 RANTAU SELATAN |

c. KECAMATAN BILAH BARAT

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|------------------------------|--------------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU |
| 1 | 10205943 | SDN 112145 JANJI | SDN 01 BILAH BARAT |
| 2 | 10205942 | SDN 112146 JANJI | SDN 02 BILAH BARAT |
| 3 | 10205933 | SDN 112155 GUNUNG RAYA | SDN 03 BILAH BARAT |
| 4 | 10205931 | SDN 112157 SUKA RAKYAT | SDN 04 BILAH BARAT |
| 5 | 10205913 | SDN 112158 TANJUNG MEDAN | SDN 05 BILAH BARAT |
| 6 | 10205912 | SDN 112159 SIBARGOT | SDN 06 BILAH BARAT |
| 7 | 10205911 | SDN 112160 BANDAR KUMBUL | SDN 07 BILAH BARAT |
| 8 | 10205893 | SDN 12161 MAILIL | SDN 08 BILAH BARAT |
| 9 | 10205891 | SDN 112163 TEBING LINGGAHARA | SDN 09 BILAH BARAT |
| 10 | 10205819 | SDN 114379 PERLAISAN | SDN 10 BILAH BARAT |
| 11 | 10205818 | SDN 114380 PADANG LAUT | SDN 11 BILAH BARAT |
| 12 | 10205817 | SDN 114381 JANJI | SDN 12 BILAH BARAT |
| 13 | 10205815 | SDN 114383 PURBA BANGUN | SDN 13 BILAH BARAT |
| 14 | 10205812 | SDN 114616 AEK TAYAS | SDN 14 BILAH BARAT |
| 15 | 10205810 | SDN 115522 SILUMAN | SDN 15 BILAH BARAT |
| 16 | 10205023 | SDN 115526 TERBANGAN JANJI | SDN 16 BILAH BARAT |
| 17 | 10205039 | SDN 115528 ASRAMA KODIM | SDN 17 BILAH BARAT |
| 18 | 10205038 | SDN 115529 SUKA RAMAI | SDN 18 BILAH BARAT |
| 19 | 10205141 | SDN 116876 AFD. I | SDN 19 BILAH BARAT |
| 20 | 10205140 | SDN116877 DATA NAULI | SDN 20 BILAH BARAT |
| 21 | 10205102 | SDN 117468 BATUBUJUR | SDN 21 BILAH BARAT |
| 22 | 10205099 | SDN 117471 SIBARGOT | SDN 22 BILAH BARAT |
| 23 | 10204864 | SDN 117831 TANJUNG BERINGIN | SDN 23 BILAH BARAT |
| 24 | 10204867 | SDN 117834 TANJUNG SARI | SDN 24 BILAH BARAT |
| 25 | 10205329 | SDN 118243 JANJI | SDN 25BILAH BARAT |
| 26 | 10205311 | SDN 118372 BANGUN SARI | SDN 26 BILAH BARAT |
| 27 | 10205421 | SDN 118431 BINANGAN TOLANG | SDN 27 BILAH BARAT |
| 28 | 10260965 | SDN 118437 SINGGAMATA | SDN 28 BILAH BARAT |
| 29 | 10259503 | SDN 118442 PASIR SIDIMPUAN | SDN 29 BILAH BARAT |

d. KECAMATAN BILAH HULU

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|---------------------------------|-------------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU |
| 1 | 10205937 | SDN 112151 JANJI LOBI | SDN 01 BILAH HULU |
| 2 | 10205936 | SDN 112152 TITI ALOBAN | SDN 02 BILAH HULU |
| 3 | 10205889 | SDN 112164 TALUN MANOMBUK | SDN 03 BILAH HULU |
| 4 | 10205887 | SDN 112165 AEK NABARA | SDN 04 BILAH HULU |
| 5 | 10205886 | SDN 112166 AEK NABARA | SDN 05 BILAH HULU |
| 6 | 10205885 | SDN 112167 AEK NABARA | SDN 06 BILAH HULU |
| 7 | 10205884 | SDN 112168 AEK NABARA | SDN 07 BILAH HULU |
| 8 | 10205882 | SDN 112170 N-2 AEK NABARA | SDN 08 BILAH HULU |
| 9 | 10205881 | SDN 112171 N-3 AEK NABARA | SDN 09 BILAH HULU |
| 10 | 10205880 | SDN 112172 N-4 AEK NABARA | SDN 10 BILAH HULU |
| 11 | 10205879 | SDN 112173 N-5 AEK NABARA | SDN 11 BILAH HULU |
| 12 | 10205878 | SDN 112174 N-6 AEK NABARA | SDN 12 BILAH HULU |
| 13 | 10205877 | SDN 112175 N-7 AEK NABARA | SDN 13 BILAH HULU |
| 14 | 10205894 | SDN 112176 N-8 AEK NABARA | SDN 14 BILAH HULU |
| 15 | 10205895 | SDN 112177 S-1 AEK NABARA | SDN 15 BILAH HULU |
| 16 | 10205910 | SDN 112178 S-2 AEK NABARA | SDN 16 BILAH HULU |
| 17 | 10205909 | SDN 112179 S-3 AEK NABARA | SDN 17 BILAH HULU |
| 18 | 10205908 | SDN 112180 S-4 AEK NABARA | SDN 18 BILAH HULU |
| 19 | 10205907 | SDN 112181 S-5 AEK NABARA | SDN 19 BILAH HULU |
| 20 | 10205906 | SDN 112182 S-6 AEK NABARA | SDN 20 BILAH HULU |
| 21 | 10205905 | SDN 112183 PERBAUNGAN | SDN 21 BILAH HULU |
| 22 | 10205904 | SDN 112184 PEMATANG SELENG | SDN 22 BILAH HULU |
| 23 | 10205903 | SDN 112185 GUNUNG SELAMAT | SDN 23 BILAH HULU |
| 24 | 10205902 | SDN 112186 112186 TANJUNG SIRAM | SDN 24 BILAH HULU |
| 25 | 10205901 | SDN 112187 SIDOREJO | SDN 25 BILAH HULU |
| 26 | 10205821 | SDN 114377 AEK NABARA | SDN 26 BILAH HULU |
| 27 | 10205009 | SDN 115523 KAMPUNG MENANTI | SDN 27 BILAH HULU |
| 28 | 10205024 | SDN 115527 TANJUNG SIRAM | SDN 28 BILAH HULU |
| 29 | 10205036 | SDN 115531 AEK NABARA | SDN 29 BILAH HULU |
| 30 | 10205034 | SDN 115533 GUNUNG SELAMAT | SDN 30 BILAH HULU |
| 31 | 10205033 | SDN 115534 JANJI LOBI | SDN 31 BILAH HULU |
| 32 | 10205031 | SDN 116240 KAMPUNG DALAM | SDN 32 BILAH HULU |
| 33 | 10205029 | SDN 116242 SIDOREJO | SDN 33 BILAH HULU |
| 34 | 10205028 | SDN 116243 BINTASE JAE | SDN 34 BILAH HULU |
| 35 | 10205138 | SDN 116879 SUKAMULIA | SDN 35 BILAH HULU |
| 36 | 10205101 | SDN 117469 PEMATANG SELENG | SDN 36 BILAH HULU |
| 37 | 10205098 | SDN 117472 SIBORANGAN | SDN 37 BILAH HULU |
| 38 | 10204863 | SDN 117830 P3RSU TANJUNG SIRAM | SDN 38 BILAH HULU |
| 39 | 10204865 | SDN 117832 KAMPUNG LALANG | SDN 39 BILAH HULU |
| 40 | 10204878 | SDN 117836 N-2 AEK NABARA | SDN 40 BILAH HULU |
| 41 | 10204991 | SDN 118153 MUALMAS | SDN 41 BILAH HULU |
| 42 | 10205326 | SDN 118251 TANJUNG SIRAM | SDN 42 BILAH HULU |
| 43 | 10205342 | SDN 118252 AEK NABARA | SDN 43 BILAH HULU |
| 44 | 10205322 | SDN 118323 AEK NABARA | SDN 44 BILAH HULU |
| 45 | 10220650 | SDN 118430 PONDOK PAPAN | SDN 45 BILAH HULU |

e. KECAMATAN PANGKATAN

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|------------------------------------|------------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU |
| 1 | 10205947 | SDN 112194 PANGKATAN | SDN 01 PANGKATAN |
| 2 | 10205983 | SDN 112195 SIDODADI | SDN 02 PANGKATAN |
| 3 | 10205998 | SDN 112196 TEBING TINGGI PANGKATAN | SDN 03 PANGKATAN |
| 4 | 10205997 | SDN 112197 KAMPUNG SENNAH | SDN 04 PANGKATAN |
| 5 | 10205996 | SDN 112198 PERK. PANGKATAN | SDN 05 PANGKATAN |
| 6 | 10205995 | SDN 112199 KAMPUNG PADANG | SDN 06 PANGKATAN |
| 7 | 10205017 | SDN 115516 KAMPUNG SENNAH | SDN 07 PANGKATAN |
| 8 | 10205015 | SDN 115518 TANJUNG HARAPAN | SDN 08 PANGKATAN |
| 9 | 10205014 | SDN 115519 PANGKATAN | SDN 09 PANGKATAN |
| 10 | 10205013 | SDN 115520 SIDODADI | SDN 10 PANGKATAN |
| 11 | 10259502 | SDN 115858 TANJUNG HARAPAN | SDN 11 PANGKATAN |
| 12 | 10205027 | SDN 116244 SIDORUKUN | SDN 12 PANGKATAN |
| 13 | 10205026 | SDN 116245 PULAU INTAN | SDN 13 PANGKATAN |
| 14 | 10205115 | SDN 116400 SUKARAMAI | SDN 14 PANGKATAN |
| 15 | 10205092 | SDN 116890 ALURAN NAGA | SDN 15 PANGKATAN |
| 16 | 10204911 | SDN 117482 KAMPUNG JAWA | SDN 16 PANGKATAN |
| 17 | 10204908 | SDN 117485 TANJUNG MAKMUR | SDN 17 PANGKATAN |
| 18 | 10204896 | SDN 117838 TIMBANG AIR | SDN 18 PANGKATAN |
| 19 | 10204895 | SDN 117839 SIDOKUKUH | SDN 19 PANGKATAN |
| 20 | 10204988 | SDN 118156 KARANG ANYAR | SDN 20 PANGKATAN |
| 21 | 10204987 | SDN 118157 SETIAWAN | SDN 21 PANGKATAN |
| 22 | 10204969 | SDN 118158 BATUMAS | SDN 22 PANGKATAN |
| 23 | 10204967 | SDN 118160 SIMPANG TIGA | SDN 23 PANGKATAN |
| 24 | 10204949 | SDN 118161 KAMPUNG IX | SDN 24 PANGKATAN |
| 25 | 10205308 | SDN 118376 TANJUNG HARAPAN | SDN 25 PANGKATAN |
| 26 | 10261198 | SDN 118438 TANAH TINGGI PANGKATAN | SDN 26 PANGKATAN |

f. KECAMATAN BILAH HILIR

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|---------------------------------|--------------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU |
| 1 | 10205900 | SDN 112188 NEGERI LAMA | SDN 01 BILAH HILIR |
| 2 | 10205899 | SDN 112189 NEGERI LAMA | SDN 02 BILAH HILIR |
| 3 | 10205898 | SDN 112190 PERK.NEGERI LAMA | SDN 03 BILAH HILIR |
| 4 | 10205897 | SDN 112191 PERK. SENNAH | SDN 04 BILAH HILIR |
| 5 | 10205896 | SDN 112192 SEI MAMBANG | SDN 05 BILAH HILIR |
| 6 | 10205876 | SDN 112193 SEI BULUH | SDN 06 BILAH HILIR |
| 7 | 10205860 | SDN 114372 NEGERI LAMA | SDN 07 BILAH HILIR |
| 8 | 10205859 | SDN 114373 SEI TAMPANG | SDN 08 BILAH HILIR |
| 9 | 10205841 | SDN 114374 SELAT BESAR | SDN 09 BILAH HILIR |
| 10 | 10205018 | SDN 115515 NEGERI LAMA SEBERANG | SDN 10 BILAH HILIR |
| 11 | 10205016 | SDN 115517 SELAT BESAR | SDN 11 BILAH HILIR |
| 12 | 10205025 | SDN 116246 BANGUN SARI | SDN 12 BILAH HILIR |
| 13 | 10205130 | SDN 116460 KAMPUNG BILAH | SDN 13 BILAH HILIR |
| 14 | 10205091 | SDN 116891 SEI TAMPANG | SDN 14 BILAH HILIR |
| 15 | 10205090 | SDN 116892 TANJUNG HALOBAN | SDN 15 BILAH HILIR |
| 16 | 10204912 | SDN 117481 SEI TAMPANG | SDN 16 BILAH HILIR |
| 17 | 10204910 | SDN 117483 INDRA KAYA | SDN 17 BILAH HILIR |
| 18 | 10204909 | SDN 117484 AL-FAJAR | SDN 18 BILAH HILIR |
| 19 | 10204907 | SDN 117486 KAMPUNG SIPIROK | SDN 19 BILAH HILIR |
| 20 | 10204894 | SDN 117840 SELAT CINA | SDN 20 BILAH HILIR |
| 21 | 10204893 | SDN 117841 SIMPANG JENGKOL | SDN 21 BILAH HILIR |
| 22 | 10204968 | SDN 118159 TUALANG SEBERANG | SDN 22 BILAH HILIR |
| 23 | 10205293 | SDN 118315 PERK. NEGERI LAMA | SDN 23 BILAH HILIR |
| 24 | 10205292 | SDN 118316 SELAT BESAR | SDN 24 BILAH HILIR |
| 25 | 10205428 | SDN 118402 PONDOK HUTAN | SDN 25 BILAH HILIR |
| 26 | 10205422 | SDN 118428 SIDOMULYO | SDN 26 BILAH HILIR |
| 27 | 10260883 | SDN 118435 SEI TAMPANG | SDN 27 BILAH HILIR |
| 28 | 10260884 | SDN 118440 SIDOMAKMUR | SDN 28 BILAH HILIR |
| 29 | 69787423 | SDN 118444 SEI TAMPANG | SDN 29 BILAH HILIR |

g. KECAMATAN PANAI HULU

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|---------------------------------|-------------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU |
| 1 | 10205991 | SDN 112203 TANJUNG SARANG ELANG | SDN 01 PANAI HULU |
| 2 | 10205990 | SDN 112204 CINTA MAKMUR | SDN 02 PANAI HULU |
| 3 | 10205989 | SDN 112205 TELUK SENTOSA | SDN 03 PANAI HULU |
| 4 | 10205988 | SSDN 112206 AJAMU | SDN 04 PANAI HULU |
| 5 | 10205987 | SDN 112207 AJAMU | SDN 05 PANAI HULU |
| 6 | 10205986 | SDN 112208 AJAMU | SDN 06 PANAI HULU |
| 7 | 10205985 | SDN 112209 AJAMU | SDN 07 PANAI HULU |
| 8 | 10205984 | SDN 112210 MERANTI PAHAM | SDN 08 PANAI HULU |
| 9 | 10206015 | SDN 112215 SEI JAWI-JAWI | SDN 09 PANAI HULU |
| 10 | 10205862 | SDN 114370 TELUK SENTOSA | SDN 10 PANAI HULU |
| 11 | 10205861 | SDN 114371 SEI SENTOSA | SDN 11 PANAI HULU |
| 12 | 10205021 | SDN 115512 TANJUNG SARANG ELANG | SDN 12 PANAI HULU |
| 13 | 10205006 | SDN 116247 CINTA MAKMUR | SDN 13 PANAI HULU |
| 14 | 10205076 | SDN 116248 MERANTI PAHAM | SDN 14 PANAI HULU |
| 15 | 10204915 | SDN 117494 TANJUNG SARANG ELANG | SDN 15 PANAI HULU |
| 16 | 10204916 | SDN 117495 SEI SITORUS | SDN 16 PANAI HULU |
| 17 | 10204891 | SDN 117843 KAMPUNG 45 | SDN 17 PANAI HULU |
| 18 | 10204889 | SDN 117844 SEI SENTOSA | SDN 18 PANAI HULU |
| 19 | 10204948 | SDN 118162 SEI KERANG | SDN 19 PANAI HULU |
| 20 | 10204947 | SDN 118163 JAWI JAWI DARAT | SDN 20 PANAI HULU |
| 21 | 10204946 | SDN 118164 AJAMU | SDN 21 PANAI HULU |
| 22 | 10205407 | SDN 118387 TANJUNG SARANG ELANG | SDN 22 PANAI HULU |

h. KECAMATAN PANAI TENGAH

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|----------------------------|---------------------|
| | | NAMA LAMA | NAMA BARU |
| 1 | 10205994 | SDN 112200 LABUHANBILIK | SDN 01 PANAI TENGAH |
| 2 | 10205993 | SDN 112201 LABUHANBILIK | SDN 02 PANAI TENGAH |
| 3 | 10205992 | SDN 112202 LABUHANBILIK | SDN 03 PANAI TENGAH |
| 4 | 10206001 | SDN 112211 SEI PELANCANG | SDN 04 PANAI TENGAH |
| 5 | 10206002 | SDN 112212 BAGAN BILAH | SDN 05 PANAI TENGAH |
| 6 | 10206013 | SDN 112213 SEI RAKYAT | SDN 06 PANAI TENGAH |
| 7 | 10206014 | SDN 112214 SEI NAHODARIS | SDN 07 PANAI TENGAH |
| 8 | 10206009 | SDN 112222 TELAGA SUKA | SDN 08 PANAI TENGAH |
| 9 | 10205022 | SDN 115511 PASAR TIGA | SDN 09 PANAI TENGAH |
| 10 | 10205020 | SDN 115513 BAGAN BILAH | SDN 10 PANAI TENGAH |
| 11 | 10205147 | SDN 116249 SEI NAHODARIS | SDN 11 PANAI TENGAH |
| 12 | 10205107 | SDN 116910 LABUHANBILIK | SDN 12 PANAI TENGAH |
| 13 | 10205106 | SDN 116911 SELAT BETING | SDN 13 PANAI TENGAH |
| 14 | 10205105 | SDN 116912 SEI MERDEKA | SDN 14 PANAI TENGAH |
| 15 | 10204931 | SDN 117496 SEI DUMUN | SDN 15 PANAI TENGAH |
| 16 | 10204930 | SDN 117497 SEI SIARTI | SDN 16 PANAI TENGAH |
| 17 | 10204887 | SDN 117845 KAMPUNG SELAMAT | SDN 17 PANAI TENGAH |
| 18 | 10204945 | SDN 118165 BAGAN BILAH | SDN 18 PANAI TENGAH |
| 19 | 10205309 | SDN 118375 LABUHANBILIK | SDN 19 PANAI TENGAH |
| 20 | 10205398 | SDN 118396 SEI PELANCANG | SDN 20 PANAI TENGAH |
| 21 | 10259528 | SDN 118443 SEI UDANG | SDN 21 PANAI TENGAH |
| 22 | 10260893 | SDN 118445 BUNUT | SDN 22 PANAI TENGAH |
| 23 | 69945058 | SDN 118446 PASAR TIGA | SDN 23 PANAI TENGAH |

i. KECAMATAN PANAI HILIR

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | |
|----|----------|-----------------------------|--------------------|
| | | LAMA | BARU |
| 1 | 10206016 | SDN 112216 SEI BEROMBANG | SDN 01 PANAI HILIR |
| 2 | 10206017 | SDN 112217 SEI BAKO | SDN 02 PANAI HILIR |
| 3 | 10206018 | SDN 112218 SEI SANGGUL | SDN 03 PANAI HILIR |
| 4 | 10206019 | SDN 112219 SEI LUMUT | SDN 04 PANAI HILIR |
| 5 | 10206011 | SDN 112220 SEI PENGANTUNGAN | SDN 05 PANAI HILIR |
| 6 | 10206010 | SDN 112221 SEI BEROMBANG | SDN 06 PANAI HILIR |
| 7 | 10205866 | SDN 114366 SEI LUMUT | SDN 07 PANAI HILIR |
| 8 | 10205865 | SDN 114367 SEI PENGANTUNGAN | SDN 08 PANAI HILIR |
| 9 | 10205061 | SDN 115506 SEI PALAS | SDN 09 PANAI HILIR |
| 10 | 10205060 | SDN 115507 WONOSARI | SDN 10 PANAI HILIR |
| 11 | 10205129 | SDN 116250 KAMPUNG BARU | SDN 11 PANAI HILIR |
| 12 | 10205104 | SDN 116913 SEI BEROMBANG | SDN 12 PANAI HILIR |
| 13 | 10205103 | SDN 116914 SEI BARU | SDN 13 PANAI HILIR |
| 14 | 10204929 | SDN 117498 SEI KUBUNG | SDN 14 PANAI HILIR |
| 15 | 10204886 | SDN 117846 SEI BEROMBANG | SDN 15 PANAI HILIR |
| 16 | 10204885 | SDN 117847 SEI SANGGUL | SDN 16 PANAI HILIR |
| 17 | 10204884 | SDN 117848 SUKA DAME | SDN 17 PANAI HILIR |
| 18 | 10204994 | SDN 117968 SEI BUNGA | SDN 18 PANAI HILIR |
| 19 | 10204944 | SDN 118166 SEI SAKAT | SDN 19 PANAI HILIR |
| 20 | 10204943 | SDN 118167 SEI TIMAH | SDN 20 PANAI HILIR |
| 21 | 10204942 | SDN 118168 SEI TAWAR | SDN 21 PANAI HILIR |
| 22 | 10261201 | SDN 118439 SEI SIALI | SDN 22 PANAI HILIR |
| 23 | 10205525 | SDN 118441 SEI KELUANG | SDN 23 PANAI HILIR |

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Lampiran III : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 29 Oktober 2018

SATUAN PENDIDIKAN SMPN

a. KECAMATAN RANTAU UTARA

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN |
|----|----------|------------------------|
| 1 | 10205229 | SMPN 1 RANTAU UTARA |
| 2 | 10205247 | SMPN 2 RANTAU UTARA |
| 3 | 10205238 | SMPN 3 RANTAU UTARA |

b. KECAMATAN RANTAU SELATAN

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN |
|----|----------|------------------------|
| 1 | 10205230 | SMPN 1 RANTAU SELATAN |
| 2 | 10205248 | SMPN 2 RANTAU SELATAN |

c. KECAMATAN BILAH BARAT

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN |
|----|----------|--------------------------|
| 1 | 10205280 | SMPN 1 BILAH BARAT |
| 2 | 10205224 | SMPN 2 BILAH BARAT |
| 3 | 10261618 | SMPN 3 SATAP BILAH BARAT |
| 4 | 69753582 | SMPN 4 SATAP BILAH BARAT |
| 5 | 69877784 | SMPN 5 BILAH BARAT |

d. KECAMATAN BILAH HILIR

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN |
|----|----------|--------------------------|
| 1 | 10205279 | SMPN 1 BILAH HILIR |
| 2 | 10205223 | SMPN 2 BILAH HILIR |
| 3 | 10205243 | SMPN 3 BILAH HILIR |
| 4 | 69728266 | SMPN 4 SATAP BILAH HILIR |

e. KECAMATAN BILAH HULU

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN |
|----|----------|------------------------|
| 1 | 10205278 | SMPN 1 BILAH HULU |
| 2 | 10205221 | SMPN 2 BILAH HULU |
| 3 | 10205242 | SMPN 3 BILAH HULU |
| 4 | 69806193 | SMPN 4 BILAH HULU |

f. KECAMATAN PANGKATAN

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN |
|----|----------|------------------------|
| 1 | 10205231 | SMPN 1 PANGKATAN |
| 2 | 10220663 | SMPN 2 SATAP PANGKATAN |

g. KECAMATAN PANAI HULU

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN |
|----|----------|-------------------------|
| 1 | 10205233 | SMPN 1 PANAI HULU |
| 2 | 10205249 | SMPN 2 PANAI HULU |
| 3 | 69725251 | SMPN 3 PANAI HULU |
| 4 | 69725557 | SMPN 4 SATAP PANAI HULU |

h. KECAMATAN PANAI TENGAH

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN |
|----|----------|---------------------------|
| 1 | 10205232 | SMPN 1 PANAI TENGAH |
| 2 | 10259656 | SMPN 2 PANAI TENGAH |
| 4 | 10261621 | SMPN 3 SATAP PANAI TENGAH |

i. KECAMATAN PANAI HILIR

| NO | NPSN | NAMA SATUAN PENDIDIKAN |
|----|----------|------------------------------|
| 1 | 10205235 | SMPN 1 PANAI HILIR |
| 2 | 10260182 | SMPN 2 SATAP PANAI HILIR |
| 3 | 69725559 | SMPN 3 SATAP PANAI HILIR |
| 4 | 69725558 | SMPN 4 SATAP PANAI HILIR |
| 5 | 69980880 | SMPN 5 SATU ATAP PANAI HILIR |

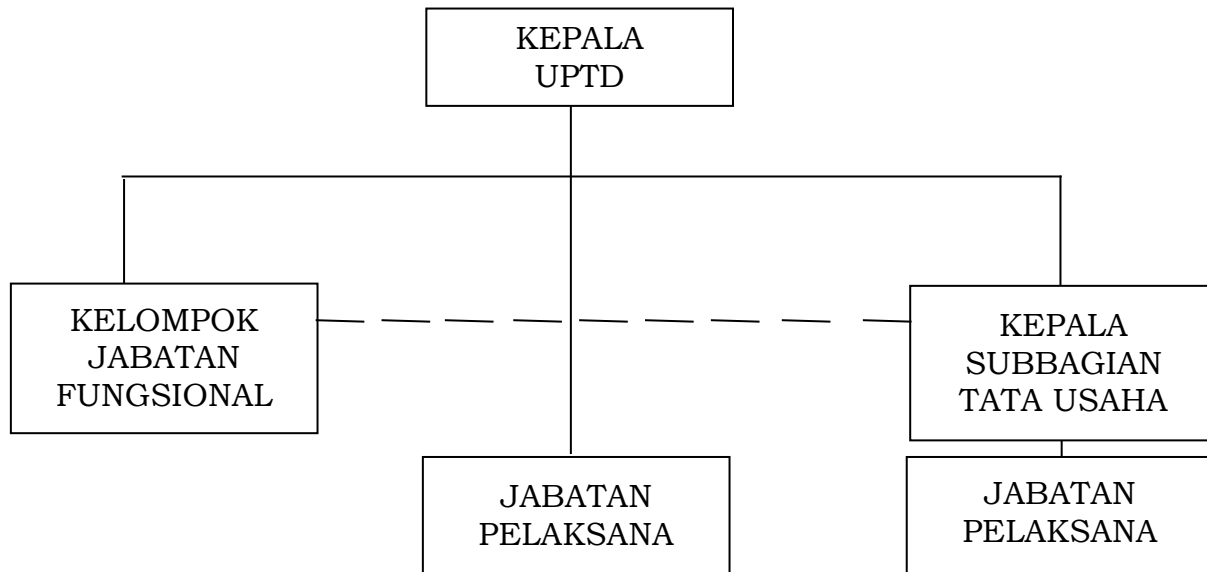
Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Lampiran IV :Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 29 Oktober 2018

SUSUNAN ORGANISASI UPTD KELAS A



Keterangan:

Garis ————— merupakan garis komando.

Garis - - - - - merupakan garis koordinasi kemitraan.

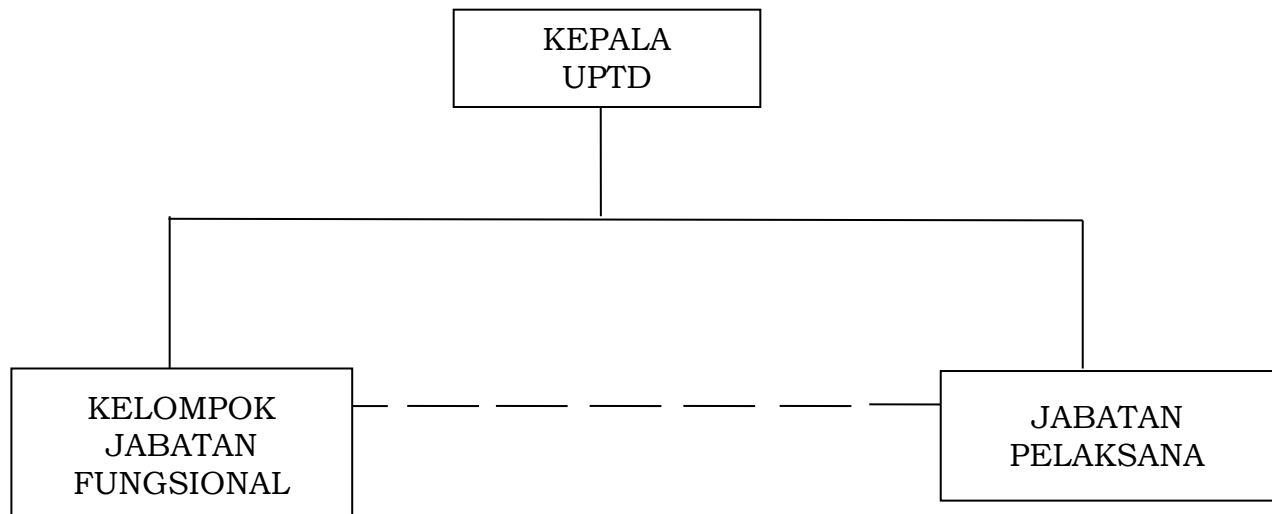
Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Lampiran V :Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 29 Oktober 2018

SUSUNAN ORGANISASI UPTD KELAS B



Keterangan:

Garis ————— merupakan garis komando.

Garis - - - - - merupakan garis koordinasi kemitraan.

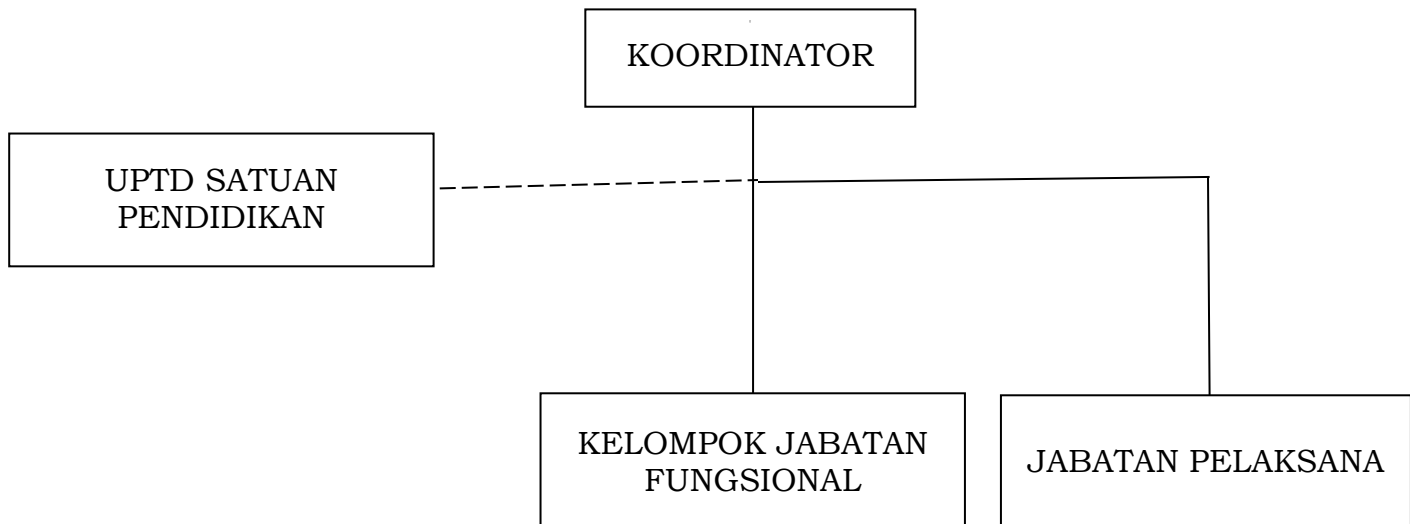
Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Lampiran VI :Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 29 Oktober 2018

SUSUNAN ORGANISASI KORWIL PENDIDIKAN



Keterangan:

Garis ————— merupakan garis komando.

Garis - - - - - merupakan garis kordinasi.

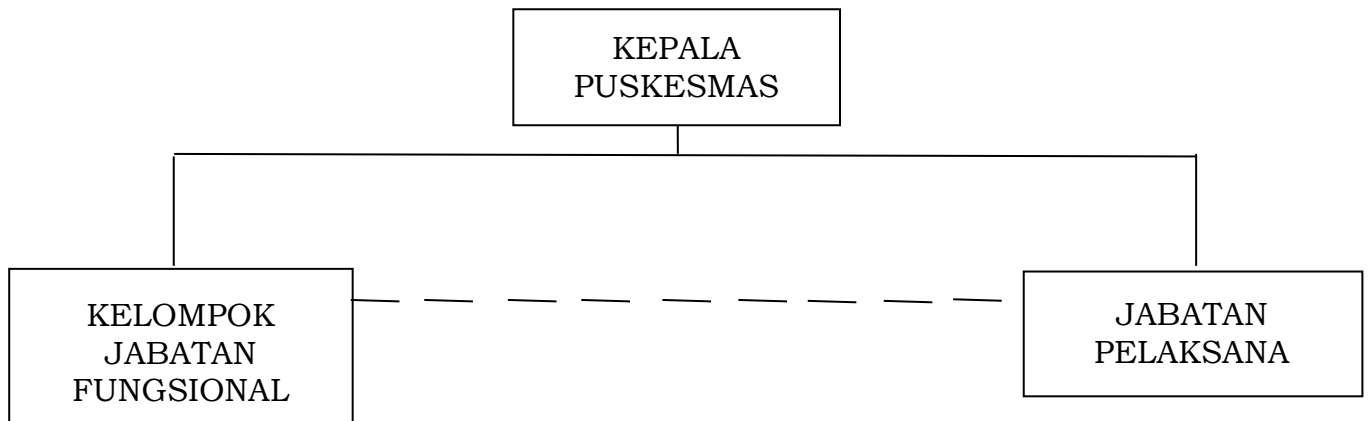
Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Lampiran VII :Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 18 Tahun 2018
Tanggal : 29 Oktober 2018

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS



Keterangan:

Garis ————— merupakan garis komando.

Garis - - - - - merupakan garis koordinasi kemitraan.

Plt. BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER